

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI: ANTARA SEKULARISME DAN REVITALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Hayun Pratiwi^{1*}, Neneng Hasanah²

¹² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan pendidikan Islam di Turki dalam konteks ketegangan antara nilai-nilai sekularisme yang diwariskan Atatürk dan upaya revitalisasi pendidikan keagamaan di era kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis dokumen dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur akademik, dokumen kebijakan pemerintah Turki, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, reformasi sistem 4+4+4 yang diperkenalkan pada tahun 2012 mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan pendidikan dari sekuler murni menuju integrasi nilai-nilai Islam; kedua, revitalisasi sekolah Imam Hatip sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama berdampak signifikan terhadap peta kelembagaan pendidikan nasional Turki; ketiga, ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta persoalan pendidikan anak pengungsi Suriah menjadi tantangan struktural yang belum terselesaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Turki berada dalam kondisi transisi yang kompleks, di mana kepentingan ideologis, kebutuhan sosial, dan tuntutan globalisasi saling berinteraksi secara dinamis. Implikasi temuan ini relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di negara-negara yang tengah menghadapi dikotomi serupa antara modernisasi dan pelestarian identitas keagamaan.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan Islam, sekularisme, reformasi 4+4+4, sekolah Imam Hatip, Turki

Abstract: This study aims to analyze the dynamics of Islamic education policy in Turkey within the context of the tension between the secular values inherited from Atatürk and efforts to revitalize religious education in the contemporary era. The study employs a qualitative approach using document analysis and literature review methods. Data were collected from various academic literature sources, Turkish government policy documents, and relevant previous studies. The findings reveal three main points. First, the 4+4+4 education system reform introduced in 2012 reflects a shift in educational policy orientation from strict secularism toward the integration of Islamic values. Second, the revitalization of Imam Hatip schools, as a response to society's demand for religion-based education, has had a significant impact on the institutional landscape of Turkey's national education system. Third, disparities in educational quality between urban and rural areas, as well as issues related to the education of Syrian refugee children, remain unresolved structural challenges. The study concludes that Turkey's education policy is undergoing a complex transitional phase in which ideological interests, social needs, and the demands of globalization interact dynamically. The implications of these findings are relevant to the development of Islamic education policies in countries facing similar dilemmas between modernization and the preservation of religious identity.

Keywords: Islamic education policy, secularism, 4+4+4 reform, Imam Hatip schools, Turkey

***Corresponding Author:** Hayun Pratiwi, ✉ hyunprtiwi173@gmail.com

Submitted: 13 Juni 2026; *Accepted in revised form:* 28 Juli 2026; *Accepted:* 31 Juli 2026; *Published:* 31 Juli 2026

Pendahuluan

Pendidikan bukan hanya tempat konflik ideologis, tetapi juga alat strategis untuk membangun identitas nasional bangsa. Turki adalah laboratorium kebijakan pendidikan yang menarik untuk dipelajari karena berada di persimpangan dua peradaban besar Barat dan Islam. Sejak Republik Turki didirikan pada tahun 1923, sistem pendidikan negara itu dimaksudkan untuk membebaskan diri dari kekhalifahan Ottoman dan membantu modernisasi sekuler. (Novita et al., 2024). Namun, lebih dari satu abad kemudian, arah kebijakan tersebut terus diuji oleh realitas sosial dan dinamika politik yang berubah.

Dalam sistem pendidikan Turki, konflik antara sekularisme dan prinsip-prinsip Islam bukanlah sesuatu yang baru. Sejak reformasi Atatürk, negara memegang kendali penuh atas kurikulum, termasuk menghilangkan pendidikan agama dari ruang sekolah publik. Namun, orientasi kebijakan pendidikan mengalami perubahan besar seiring dengan naiknya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ke tampuk kekuasaan pada tahun 2002. Salah satu contohnya adalah reformasi struktural sistem pendidikan wajib, yang dimulai pada tahun 2012 dengan penerapan model 4+4+4, yang meningkatkan pendidikan dari delapan tahun menjadi dua belas tahun. (Abdullah Mufid Mubarrok & Rubaidi, 2025). Reformasi ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi sarat dengan muatan ideologis yang mencerminkan visi keislaman yang lebih terbuka di ruang publik.

Kajian mengenai sistem pendidikan Turki umumnya masih bersifat parsial-sebagian hanya membahas aspek kebijakan tanpa mendalami problematikanya, sebagian lain terfokus pada satu dimensi saja tanpa melihat keterkaitan antarkomponen. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengajukan pertanyaan utama: bagaimana dinamika kebijakan pendidikan Islam di Turki berinteraksi dengan berbagai problematika struktural yang dihadapi sistem pendidikan nasionalnya?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis sistem pendidikan di Turki secara historis dan kontemporer; (2) mengidentifikasi problematika-problematika utama yang menghambat kualitas dan pemerataan pendidikan; dan (3) mengkaji kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks reformasi pasca-2012 dan revitalisasi sekolah Imam Hatip. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi analitis yang berguna

bagi pemangku kebijakan, akademisi, serta praktisi pendidikan Islam, baik di Turki maupun di negara-negara dengan konteks sosial-keagamaan yang serupa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode analisis dokumen (document analysis) dan studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bersifat interpretatif, yaitu untuk memahami makna dan dinamika di balik kebijakan pendidikan daripada hanya menjelaskan fakta statistik. (Annasthasya et al., 2025). Metode analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis berbagai dokumen kebijakan, laporan, dan literatur akademik yang menjadi sumber data utama.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori. Kategori pertama terdiri dari dokumen kebijakan pemerintah Turki, undang-undang pendidikan, dan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional Turki (MEB). Kategori kedua terdiri dari jurnal ilmiah, buku teks akademik, dan artikel ilmiah yang membahas sistem, masalah, dan kebijakan pendidikan di Turki. Untuk menjamin relevansi dan keterbaruan data, pemilihan sumber mengutamakan publikasi lima tahun terakhir, meskipun beberapa sumber historis digunakan untuk kontekstualisasi.

Analisis isi, atau analisis isi, adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisis data. Proses analisis terdiri dari lima tahap: (1) pengumpulan dan seleksi dokumen yang relevan dengan subjek penelitian; (2) pembacaan kritis dari semua sumber; (3) pengkodean tematik untuk menemukan kontradiksi, pola, dan argumen utama; (4) interpretasi temuan dalam konteks kerangka teori yang telah ditetapkan; dan (5) penarikan kesimpulan berdasarkan argumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yang berarti temuan dari berbagai macam dokumen dikombinasikan dengan penilaian sesama peneliti dalam kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi 4+4+4: Pergeseran Ideologis atau Modernisasi Struktural?

Seperti yang ditunjukkan oleh analisis yang dilakukan terhadap reformasi sistem pendidikan 4+4+4 yang diberlakukan pada tahun 2012, kebijakan tersebut tidak hanya mengalami perubahan administratif; itu juga memiliki aspek ideologis yang signifikan. Reformasi ini membagi pendidikan wajib dua belas tahun menjadi tiga jenjang: sekolah dasar pertama, sekolah dasar kedua, dan sekolah menengah atas (Nurmala Anggun Rahayu, 2026). Namun, pembagian ini memiliki implikasi yang jauh lebih dalam dari sekadar pengelompokan usia.

Salah satu konsekuensi paling signifikan adalah memungkinkan siswa memasuki pendidikan keagamaan di usia lebih muda. Sekolah Imam Hatip sebelum reformasi menerima siswa baru setelah delapan tahun pendidikan dasar. Jalur baru dibuka lebih awal, memperluas jangkauan institusi pendidikan berbasis agama. Hal ini sejalan dengan temuan Ana Kurnia Sari (2023) yang mengidentifikasi reformasi 4+4+4 sebagai bagian dari strategi inkremental pemerintah AKP untuk memperluas ruang pendidikan Islam dalam sistem nasional.

Dari sudut pandang teori kebijakan pendidikan berbasis nilai, perubahan ini dapat dianggap sebagai hasil dari perselisihan nilai yang telah terjadi sejak Republik didirikan. Sementara komunitas sekuler melihat reformasi ini sebagai ancaman terhadap fondasi pendidikan modern, komunitas religius melihatnya sebagai koreksi historis atas pengabaian aspek keislaman dalam sistem pendidikan. (Hidayati et al., 2024). Ketegangan ini tidak selesai dengan diberlakukannya undang-undang, melainkan terus berlanjut dalam perdebatan implementasi di tingkat sekolah dan komunitas.

Selain itu, pihak pedagogis juga memberikan kritik terhadap reformasi ini. Para pendidik khawatir bahwa sistem 4+4+4 mendorong siswa ke jalur pendidikan kejuruan terlalu dini, sebelum mereka memiliki kematangan intelektual yang diperlukan untuk membuat pilihan karier. Afwan Syahril Manurung et al. (2024) mencatat bahwa sistem ini berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial dengan membatasi mobilitas pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang cenderung diarahkan ke jalur vokasional lebih awal.

Revitalisasi Sekolah Imam Hatip: Respons Kebijakan terhadap Kebutuhan Sosial

Sekolah Imam Hatip adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang dan rumit di lingkungan pendidikan Turki. Sekolah-sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga imam dan khatib pada awal Republik. Namun, mereka sempat terpinggirkan selama pemerintahan sekuler. Revitalisasinya oleh pemerintahan AKP menunjukkan perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, yang mengakui kembali pendidikan agama sebagai bagian dari sistem nasional. (Nasir, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa revitalisasi sekolah Imam Hatip mencakup aspek religius dan sosial-ekonomi. Keluarga kelas menengah bawah yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau sambil memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak mereka sangat menyukai sekolah-sekolah ini. Dengan kata lain, fenomena ini melampaui perdebatan sekuler-religius dan masuk ke ranah keadilan sosial dalam hal akses pendidikan.

Tetapi masalah dengan kurikulum masih ada. Sekolah Imam Hatip perlu menyeimbangkan kurikulum agama yang menjadi ciri khasnya dengan standar akademik umum yang diperlukan untuk masuk perguruan tinggi. Haris (2024) menemukan bahwa model integrasi ilmu dan agama yang digunakan di sekolah-sekolah ini sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam klasik yang tidak membedakan ilmu duniawi dan ukhrawi. Revitalisasi Imam Hatip dapat dilihat sebagai upaya untuk merekonstruksi identitas pendidikan Islam secara keseluruhan dalam konteks ini.

Problematika Struktural: Ketimpangan dan Fragmentasi Sistem

Sistem pendidikan Turki menghadapi masalah struktural yang terus-menerus meskipun telah dilakukan berbagai reformasi kebijakan. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah perbedaan kualitas pendidikan antara kota dan pedesaan. Naldia Defa Saputra et al. (2023) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah timur Turki berbeda dengan sekolah-sekolah di Istanbul dalam hal tenaga pengajar, fasilitas, dan akses teknologi. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menunjukkan ketimpangan selama bertahun-tahun dalam distribusi investasi pendidikan.

Pertanyaan tentang pendidikan anak-anak pengungsi menambah kompleksitas tersendiri. Jutaan pengungsi Suriah tiba di Turki, dan anak-anak yang tinggal di sana menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan. Ini termasuk stigma sosial, perbedaan dalam sistem kurikulum, kendala bahasa, dan kebutuhan finansial yang memaksa sebagian dari mereka bekerja daripada bersekolah. Irdyanti (2025) menekankan bahwa jika anak-anak pengungsi tidak dimasukkan ke dalam sistem pendidikan formal, ini akan menyebabkan masalah jangka pendek dan masalah sosial jangka panjang, seperti generasi yang tidak terdidik dan termarginalisasi.

Kesenjangan teknologi pendidikan juga menjadi perhatian yang meningkat, terutama pasca pandemi COVID-19 yang mengakselerasi kebutuhan pembelajaran digital. Agnia Rahma Farhillah et al. (2025) menemukan bahwa ketidaksesuaian infrastruktur digital meningkatkan disparitas pendidikan di antara daerah. Karena banyaknya adopsi platform pembelajaran digital di sekolah-sekolah urban, sekolah-sekolah di daerah rural masih menggunakan metode pembelajaran konvensional karena keterbatasan akses internet dan perangkat.

Dari sudut pandang analitis, ketiga masalah ini berkorelasi satu sama lain dalam apa yang dikenal sebagai "lingkaran setan ketimpangan pendidikan." Ketimpangan di wilayah menyebabkan ketimpangan dalam kualitas guru, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan siswa untuk bersaing dalam persaingan yang sangat ketat dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, ketimpangan sosial antargenerasi diperpanjang oleh sistem seleksi yang eksklusif. Untuk memecahkan rantai ini, tidak hanya reformasi prosedural yang diperlukan, tetapi intervensi kebijakan yang afirmatif dan sistemik diperlukan.

Relevansi Kebijakan Pendidikan Turki bagi Konteks Indonesia

Studi komparatif tentang sistem pendidikan di Indonesia dan Turki menunjukkan beberapa kesamaan struktural yang menarik. Kedua negara, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, memiliki warisan perjuangan antara mempertahankan identitas Islam dan modernisasi sekuler. Abdullah Mufid dan Rubaidi (2025) mengidentifikasi bahwa sekolah Imam Hatip Turki menciptakan model integrasi pendidikan umum dan agama yang

berfungsi dengan madrasah di Indonesia, yang juga terus bernegosiasi antara kurikulum keagamaan dan standar nasional.

Meskipun demikian, ada perbedaan konteks yang harus diperhatikan. Dengan sekularisme yang kuat sebagai prinsip konstitusional Turki, setiap pengembangan pendidikan agama harus diatur dalam koridor hukum yang ketat. Relasi antara negara dan agama di Indonesia lebih mirip simbiotik karena gagasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui peran agama dalam kehidupan masyarakat. Karena perbedaan konteks ini, transfer kebijakan pembelajaran dari Turki harus dilakukan dengan hati-hati. Sebaliknya, kebijakan harus dimasukkan ke dalam konteks kekhasan konstitusional dan sosiokultural Indonesia.

Simpulan

Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam Turki sedang mengalami transisi yang kompleks dan berbagai aspek. Revitalisasi sekolah Imam Hatip dan reformasi 4+4+4 tahun 2012 bukan hanya perubahan administrasi teknis; itu juga menunjukkan pergeseran ideologis yang signifikan dalam bagaimana negara memperlakukan agama dalam pendidikan publik. Meskipun kelompok religius menyambut pergeseran ini dengan baik, masih ada perdebatan tentang bagaimana hal itu berkaitan dengan kebutuhan pendidikan kontemporer yang bersaing di seluruh dunia.

Kebijakan reformasi yang berbeda belum menyelesaikan masalah struktural seperti kesenjangan teknologi, kesulitan pendidikan anak pengungsi, ketimpangan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan tekanan sistem seleksi perguruan tinggi yang eksklusif. Hasil ini menunjukkan bahwa masalah utama di pendidikan Turki adalah masalah keadilan sosial dan pemerataan yang lebih mendasar daripada pilihan antara sekularisme dan keislaman.

Kebijakan afirmatif yang menjamin pemerataan kualitas pendidikan lintas wilayah, memperkuat program integrasi pendidikan anak pengungsi, dan membangun infrastruktur digital yang inklusif harus menjadi prioritas utama pemerintah Turki. Pada tataran akademik, penelitian ini menyarankan untuk melakukan penelitian tambahan yang membandingkan model pendidikan Islam Turki dengan model pendidikan di negara-negara Muslim lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Mufid Mubarrok, & Rubaidi. (2025). Dinamika Sekularisme dan Islamisme dalam Politik Modern Turki: Studi Komparatif Atatürk dan Erdoğan. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 20(2), 231–254.
<https://doi.org/10.37680/adabiya.v20i2.7322>
- Afwan Syahril Manurung, Nisa Afifah, Yoserizal Saragih, Z. S. (2024). Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Upaya Mendorong Mobilitas Sosial Peserta Didik. *Effect: Jurnal Kajian Konseling*, 3(1).
<https://ejournal.yana.or.id/index.php/effect/>
- Agnia Rahma Farhillah, Asti Rahmawati, Chairunisa Chairunisa, & Afiyatun Kholifah. (2025). Model Perbandingan Pendidikan Global di Era Digital : Tantangan dan Strategi Penerapan di Indonesia. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 11–26. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v3i1.323>
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Haris, A. G. (2024). Revitalisasi Pemikiran Pendidikan Islam Klasik Dalam Konteks Pendidikan Indonesia Masa Kini Menumbuhkan. *Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Islam Volume*, 1, 74–89.
- Hidayati, N., Badriyah, L., Hunaida, W. L., Fitriatin, N., & Usman, E. (2024). Relevansi Pemikiran Gus Dur Tentang Pendidikan Perdamaian (Peace Education) Dengan Kurikulum Merdeka Di Indonesia. *Jurnal Kajian Keislan*, 13(1), 1–15.
- Irdayanti Irdayanti, F. R. A. N. (2025). Dinamika Pendidikan Anak Pengungsi Di. *Jurnal El-Riyasah*, 16(2), 169–185.
- Naldia Defa Saputra, Muhammad Luthfi Dharmawan, Dikdik Fauzi Dermawan, I. Z. A. (2023). Efektivitas Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Pembelajaran Pendidikan Jasmani. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 359–364.
- Nasir, M. F. A. (2024). Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Dasar Islam Masa Turki Usmani Dan Relevansinya Di Era 5.0. *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(2), 34–59.
<https://www.ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/view/95%0Ahttps://www.ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/download/95/68>
- Novita, N. C., Sofya, A., Annur, S., & Afriantoni, A. (2024). Dinamika Pendidikan Indonesia dan Turki: Studi Komparatif. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1748–1762.
<https://doi.org/10.56832/edu.v4i3.561>
- Nurmala Anggun Rahayu, Y. H. (2026). Refleksi Kritis Dan Analisis Studi Kasus Kebijakan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Serta Rekomendasi Perbaikannya. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 17(01), 6–17.
- Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam di Era Digital. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37.